

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Michel Foucault adalah seorang filsuf yang juga dikenal sebagai cendekiawan yang cukup memberi andil dalam beberapa bidang khusus ilmu pengetahuan. Semasa hidupnya Foucault telah menghasilkan pelbagai karya intelektual. Pemikiran Foucault mengenai relasi kuasa secara terperinci digambarkan dalam karyanya *Discipline and Punish: The Birth of Prison*, *Power/Knowledge* dan *The History of Sexuality*, ia memberi perhatian mengenai bagaimana kuasa itu bekerja dan dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Foucault memiliki cara pandang yang berbeda mengenai kuasa dari kebanyakan filsuf dan para pemikir lainnya. Foucault memaknai kuasa bukan sebagai suatu kepemilikan seseorang terhadap sumber-sumber atau aset kekuasaan, melainkan lebih mengarah kepada penerapan disiplin, pengontrolan dan pelbagai kohesi sosial. Saat manusia hidup dalam suatu lingkungan dan berinteraksi antara satu dan lainnya, di tempat itulah kuasa bekerja. Pada saat yang sama, pengetahuan akan tercipta dan diterima sebagai kebenaran. Dari perspektif ini, kita dapat dihantar kepada dialektika kuasa dan pengetahuan yang terjadi di dalam media sosial.

Segala bentuk propaganda yang dilakukan oleh para *buzzer* politik melalui produksi wacana dalam media sosial, pada akhirnya dapat saja menjadi konvensi sosial yang diterima secara permisif dan masif sebagai sebuah realitas kebenaran baru yang kemudian juga diterima secara normal dalam masyarakat. Aktivitas pendisiplinan dan mekanisme kontrol yang dilakukan para *buzzer* politik di media sosial menyebabkan banyak pengguna media yang mudah saja terprovokasi oleh wacana yang diproduksi. Berhadapan dengan kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif dan propaganda *buzzer* yang lebih menekankan pada kebenaran performatif, di mana kebenaran hanya sekadar diciptakan untuk memantik daya tarik emosional, maka *buzzer* politik bisa menjadi lonceng pertanda matinya demokratisasi media. *Buzzer* politik

dibiarkan begitu saja menguasai dan mengobrak-abrik ruang publik. Jika aktivitas *buzzer* politik tidak disadari oleh masyarakat luas sebagai wujud kekuasaan yang hendak menormalisasi, maka bisa berdampak luas terhadap polarisasi politik yang bisa memecah-belah masyarakat, manipulasi opini publik, disinformasi sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat, dan bisa menimbulkan kerusuhan sosial. Semua hal ini bisa mengancam kedaulatan negara yang memegang prinsip demokrasi, kesejahteraan rakyat diabaikan demi kepentingan segelintir orang.

Komunikasi politik yang diidealkan dalam sebuah negara demokrasi adalah perlu adanya transparansi informasi, akuntabilitas pemimpin dalam pengambilan keputusan, serta tindakan partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jika hal ini tidak dijalankan dengan baik, maka bisa dinilai bahwa ada suatu gejala penyalahgunaan kekuasaan yang hendak dipraktikkan di dalam masyarakat. Propaganda *buzzer* politik menjadi salah satu upaya menggerus aktivitas komunikasi politik yang sehat dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

Berdasarkan masalah yang dihadapi dalam proses komunikasi politik media massa, penulis melihat adanya potensi beberapa kelompok masyarakat yang akan terus berupaya mengendalikan realitas sosial melalui media massa, mereka bisa saja menggunakan berbagai macam kekuasaan yang mereka miliki. Kekuasaan itu bisa datang dari banyak elemen, bisa berupa pengetahuan, kemapanan modal ekonomi, serta relasi atau jaringan. *Buzzer* politik dalam praktiknya di media massa, berupaya untuk merebut kedudukan sosial dan mengendalikan realitas sosial. Melalui wacana yang mereka publikasi, mereka berusaha menguasai ruang pengetahuan publik. Semua hal ini dilakukan oleh *buzzer* untuk melanggengkan kekuasaan yang ingin memenangkan pertarungan kepentingan politik dari sosok yang menunggangi mereka.

Berhadapan dengan hal ini, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang hampir setiap saat menghabiskan waktu di media sosial? Foucault dalam pandangannya mengenai pembentukan subjek dan kesadaran manusia sebagai makhluk moral etis, menuntut agar manusia harus terlebih dahulu menyadari dirinya sebagai subjek yang memiliki arti dan rasa harga diri. Melalui kesadaran

ini, setiap orang mampu bertindak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam segala lapisan bermasyarakat. Selain itu, hemat penulis sebagai subjek yang sadar, setiap orang perlu memiliki kehendak ingin tahu untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, agar kemudian ia tidak mudah terprovokasi oleh pelbagai macam hal dalam setiap interaksi kehidupan sosialnya. Pengetahuan yang didasari atas pertimbangan moral dan etis, tidak hanya berdampak baik terhadap diri sendiri tetapi bisa menjangkau dan memberi pengaruh yang lebih luas kepada banyak orang.

Di samping itu, Foucault juga meyakini bahwa kekuasaan sering mendapat perlawanan atau resistensi. Penulis berpandangan bahwa, perlawanan dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi diri, salah satunya ialah melalui pengetahuan. Kemudian, pengetahuan juga harus didasari oleh pertimbangan moral etis, sehingga bisa membawa manusia kepada pembentukan diri yang lebih positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Saat ini sudah dimiliki manusia, dan ditunjang dengan kemampuan mengkritik secara sistematis dan rasional, manusia mampu membentengi dirinya dan bisa memberi perlawanan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kita perlu menyadari bahaya praktik kuasa yang sudah dinormalisasi seringkali bertentangan dengan kebenaran yang seharusnya. Jika hal ini tidak disadari dan dibiarkan terus menerus tanpa perlawanan, maka dampaknya akan semakin memperburuk situasi sosial masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang secara khusus penulis anjurkan bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang melakukan legislasi undang-undang untuk menata ruang digital dan juga pengguna media sosial yang selalu berpartisipasi di dalam ruang digital.

5.2.1 Bagi Pemerintah

Berhadapan dengan segala penggunaan media yang berhubungan langsung dengan sistem informasi dan transaksi elektronik, kedudukan pemerintah memiliki andil yang besar untuk bisa mengaturnya, hingga sampai

kepada tahap perlindungan data-data pribadi warga negaranya. Situasi ruang digital yang tidak kondusif, bisa berdampak memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Gangguan informasi (*information disorder*) menjadi salah satu masalah utama di Indonesia pada saat ini. Gangguan informasi bisa berupa *mis-information* yakni pembagian informasi yang salah tanpa bermaksud merugikan, *dis-information* (disinformasi) ketika informasi sengaja dibuat atau dipalsukan, kemudian informasi tersebut dibagikan dengan tujuan merugikan penerima informasi. Dan juga *mal-information* ketika suatu informasi yang benar dibagikan untuk menyebabkan kerugian dari individu atau pihak lain.

Dari beberapa teknik penyebaran informasi dengan segala tujuannya, pemerintah memiliki andil membuat regulasi ruang digital dengan membuat aturan berkekuatan hukum yang mengikat dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang semena-mena dari oknum-oknum tertentu, yang berupaya mengubah tatanan sosial kemasyarakatan melalui media sosial untuk kepentingan segelintir orang. Pemerintah juga harus melihat efek keberlanjutan jika banyak akun anonim seperti *buzzer* politik dibiarkan terus berkeliaran dan memproduksi informasi. Hal ini bisa membawa dampak pada melemahnya demokrasi, di mana ruang partisipasi publik diminimalisir dalam segala bentuk pengambilan keputusan. Pemerintah perlu menyadari akan pentingnya membangun dasar rasionalitas yang kuat dalam mempergunakan setiap kemajuan teknologi sesuai dengan tujuan bersama. Rasionalitas tidak hanya berpangkal pada rasionalitas untuk mencapai tujuan tertentu tetapi harus diarahkan kepada rasionalitas komunikatif yang memungkinkan penerimaan suatu nilai kebenaran yang intersubjektif.

Cita-cita menegakan demokrasi yang rasional juga mengharuskan pemerintah menyadari bahwa demokrasi adalah sistem yang menekankan persuasi dan bukan manipulasi. DPR sebagai wakil rakyat harus benar-benar menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja pemerintah dan juga selalu siap sedia menyampaikan informasi mengenai segala kebijakan pemerintah dan peraturan yang sedang berlaku. Media menjadi sarana yang ampuh untuk menjalankan persuasi ini.

Pemerintah harus sejak dini menetapkan literasi digital sebagai bagian penting dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif dan diikuti dengan kesadaran kritis untuk selalu memberi informasi serta mengevaluasi segala informasi yang ada di media sosial.

5.2.2 Pengguna Media Sosial

Pengguna media sosial diberi keleluasaan untuk terlibat aktif dalam segala proses dinamika politik melalui media sosial. Pengguna media sosial, harus menyadari akan betapa pentingnya peran serta mereka dalam membangun negara melalui keterlibatan-keterlibatan dalam menerima informasi di media. Media sosial menjadi ruang baru bagi demokrasi dan menjadi tempat yang aman bagi ruang diskursus, jika masyarakat mendasari diri pada suatu kekuatan yang mampu mengatasi segala dampak bahaya yang dihasilkan kemajuan teknologi. Pengguna media sosial di Indonesia, dalam mengkonsumsi informasi, perlu menyadari pentingnya memeriksa dan mengetahui secara pasti kredibilitas akun-akun yang menyebarkan informasi. Pengguna media sosial harus tetap berhati-hati dengan setiap narasi provokatif, dan juga harus diikuti oleh proses verifikasi informasi melalui platform-platform media yang memiliki kredibilitas.

Penulis kemudian menganjurkan pentingnya literasi digital sebagai dasar yang menentukan partisipasi dan keterlibatan pengguna di media sosial. Literasi digital berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan media. Pengguna media sosial semestinya mampu untuk mempelajari banyak hal dengan mudah saat berselancar di media sosial. Dari literasi digital yang baik, setiap pengguna mampu memilah informasi apa yang harus ia konsumsi dan apa yang harus ia abaikan. Selain itu, literasi digital bisa membentuk orang agar bisa berupaya memproduksi informasi di media sosial. Saat berhadapan dengan banyak penyebaran informasi yang tidak beraturan, para pengguna media sosial harus berupaya untuk tidak mudah terjerumus ke dalam lingkaran kuasa penyebar informasi.

Di samping itu, sebagai pengguna media sosial yang juga memberi andil dalam situasi politik, pendidikan politik juga perlu ditingkatkan baik melalui

interaksi-interaksi di media sosial maupun di dunia nyata. Pengguna harus tetap kritis dengan melihat media sosial sebagai deliberasi publik demi tercapainya konsensus bersama. Argumentasi kritis juga harus diperjuangkan untuk mengkritisi kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat. Melalui media sosial, semua orang dipermudah untuk terlibat aktif menyuarakan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Michel Foucault

- Foucault, Michel. *"Truth and Power,"* Colin Gordon (ed.). *Power/Knowledge*, Terj. Colin Gordon et al. Sussex: The Harvester Press, 1980. 109-33.
- , *Seks dan Kekuasaan*. Terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- , *Power/Knowledge*. Terj. Yudi Santosa. Yogyakarta: Narasi-Pustaka-Promethea, 2017.
- , *Wacana kuasa/ Pengetahuan*. Terj. Yudi Santosa. Yogyakarta: Narasi-Pustaka-Promethea, 2017.

Karya-Karya Tentang Michel Foucault

- Kebung, Konrad. *Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Obor, 1997
- Diskursus, Kuasa dan Kritik Institusi*. Surabaya: Cerdas Pustaka, 2021.
- , *Michel Foucault: Toolbox dan Disiplin Berpikir: Tema-tema Pemikiran Foucault dan Aplikasi Kontekstual*. Surabaya: Cerdas Pustaka, 2021.
- , *Michel Foucault: The Government of Self and Others*. Surabaya: Cerdas Pustaka, 2023.
- Dosi, Eduardus. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian- Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2016.

Sumber Sekunder

- Amalia, Mirta, Klara Esti dan Mohammad Rinaldi Camil. *The Industry of Political Buzzing in Indonesia and Its Impact on Social Media Governance Examining Viral Tweets*. Singapura: Digital Asia, 2021.
- Baran, Stanley J dan Dennis K. Davis. *Teori Dasar Komunikasi Pergolakan dan Masa Depan Massa*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.
- Chomsky, Noam. *Politik Kuasa Media*, penerj. Nurhady Sirimorok (Yogyakarta: Jalan Baru Publisher, 2021).
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*. Terj. Yantho Mustofa. Tangerang: PT. Pustaka Alvabet, 2018.
- Hardiman, F. Budi. *Aku Klik Maka Aku Ada*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Nugroho, Catur. *Cyber Society Teknologi, Media Baru dan Disrupsi Informasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Sudibyo, Agus. *Tarung Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.

-----, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.

Soyomukti, Nurani. *Komunikasi Politik Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat dan Penguasa*. Malang: Intrans Publishing, 2013.

Syaputra, Iswandi. *Rezim Media*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Tapsel, Ross. *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital*. Tangerang: Gajah Hidup, 2017.

Artikel-artikel Jurnal

Abbiyu, Mohammad Darry dan Diah Asri Nindyaswari. "Penggunaan Buzzer dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Langgas*, 1:2 (2020): 70-81.

Andini, Amelia Tri dan Yahfizham. "Analisis Algoritma Pemrograman dalam Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Konten." *Jurnal Arjuna*, 2:1 (Februari, 2024): 286-296.

Bahasoan, Aminah dan Amir Faisal Kotarumalus. "Praktik Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultian dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia." *Jurnal Populis*, 8:1 (1 Maret, 2014): 13-22

Barata, Mariam Fatima dan Melvin Bonardo Simanjuntak. "Strategi Publisitas dan Propaganda Politik." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23:2 (Juli-Desember, 2019): 135-153.

Daeni, Fahwax Ihza Mahendra, Fitry Aliva Rachmarini dan Ilham Rhiza Utama. "Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi". *Jurnal Padjajaran Law Review*, 11:2 (Oktober, 2023): 183-200.

Dahlia, Rembulan Randu dan Panji Anugrah Permana. "Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2:1 (2022): 65-81.

Hasfi, Nurul. "Komunikasi Politik di Era Digital." *Jurnal Politika*, 10:1 (April, 2019): 93-111.

Hidayah, Nurul dkk. "Filsafat Ilmu: Epistemologi-Strukturalisme dalam Menjelajahi Kekuasaan, Pengetahuan dan Kebenaran." *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2:6 (Juni, 2023): 422-432.

- Juditha, Christiany. "Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, 3 (2019): 199-212.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault Tantangan bagi Sosiologi Politik." *Jurnal Khitabah*, 3:1 (2017): 117-133.
- Kebung, Konrad. "Membaca Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia." *Jurnal Melintas*, 33:1 (2017): 35-51.
- , "Michel Foucault: Kuasa Versus Rasionalitas Modernis (Revaluasi Diri Secara Kontinu)." *Jurnal Ledalero*, 16:1 (Juni, 2017): 55-73.
- , "Parrhesia (Truth-Telling) dan Care of The Self." *Diskursus Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 17:1 (2018): 1-29.
- Maricar, Farida. "Wacana dan Media: Antara Kekuasaan, Representasi, Ideologi dan Realitas Sosial." *Jurnal Universitas Khairun*, 16:1 (2018): 1-7.
- Mustika, Rieka. "Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial Shifting the Role of Buzzer To The World Of Politics On Social Media." *Jurnal Diakom*, 2:2, 2019: 144-151.
- Rahmawati, Devie. "Risiko Algoritma Media Sosial: Kajian terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Negara." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 33 (2021): 37-50.
- Siregar, Ade Kurniawan dan Eka Fitri Qurniawati. "Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di Tempo.co." *Journal of New Media and Communication*, 1:1 (Maret, 2021): 1-15.
- Siregar, Mangihut. "Kritik terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1:1 (2021): 1-12.
- Sugiono, Shiddiq. "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4:1 (2020): 47-66.
- Sunaryo. "(Inter-) Relasi Kekuasaan dan Kebenaran Menurut Michel Foucault." *Jurnal Dekonstruksi*, 09:03 (2023): 31-35
- Tukan, Paulus Barekama. "Buzzer Politik Pembajak Demokrasi." *Akademika*, 20:02 (2022): 39-56.
- Wulandari, Sri Riski, Andi Alimuddin Unde dan Muliadi Mau. "Masyarakat dalam Era Digital dalam Perspektif Studi Risiko dan Peluang Algoritma Media Sosial." *Jurnal Ilkom*, 8:1 (Maret, 2021): 36-55.

Youna Bactiar, Andi, Didin Hikmah Perkasa dan Mochamad Rizki Sadikun. "Peran Media dalam Propaganda." *Jurnal Komunikologi*, 13:2 (September, 2016): 78-89.

Internet

Adam, Rachel. "Michel Foucault: Discourse." 2017. <https://criticallegalthinki ng.com/2017/11/17/michel-foucault-discourse/>

Aditya, Dicky. "Buzzer Pembuat Kegaduhan Kebal Hukum, Anggota DPR RI: Pemerintah Harus Bersikap Adil." 2022. 27 September 2022. <<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354675488/buzzer-pembuat-kegaduhan-kebal-hukum-anggota-dpr-ri-pemerintah-harus-bersikap-adil>>.

Bramasta, Dandi Bayu. "Menyoal Fenomena Buzzer, dari Pernyataan Moeldoko Hingga Bantahan Istana." 2019. 20 September 2022. <<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/055211465/menyoal-fenomena-buzzer-dari-pernyataan-moeldoko-hingga-bantahan-istana?page=all>>.

Fakultas Teknis Universitas Medan Area. "Algoritma Media Sosial: Bagaimana Mereka Memengaruhi Pengalaman Online Anda". 31 Agustus 2023. <https://teknik.uma.ac.id/2023/08/31/algoritma-media-sosial-bagaimana-mereka-mempengaruhi-pengalaman-online-anda/>

Jelang Pemilu 2024 *Buzzer* Politik Bermunculan, Bagaimana Cara Kerjanya? | 60'SPECIAL REPORT". YouTube. KompasTv. Januari 2024.<https://www.youtube.com/watchv=E-0uU1Hd59I>

"Mengungkap Cara Kerja Buzzer di Indonesia Ketika Musim Politik | Telusur tvOne". YouTube. Talk Show tvOne RELOAD. September 2024.<https://www.youtube.com/watch?v=jFZRrmEiU8s>

Nuryama, Rauf. "Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Pada Tahun 2022." 2022. <<https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-2022#:~:text=TiNewss.Com%20%2D%20Ada%20191%2C,9%20persen%20dari%20total%20populasi,>>>.